

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DI PULAU SUMATERA**



Disusun Oleh:

**ANDRI FEBRIYANDA
NIM. 180604012**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYAI LMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Andri Febriyanda
NIM : 180604012
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan BisnisIslam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuandata.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry BandaAech.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Andri Febriyanda
Andri Febriyanda

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Disusun Oleh:

Andri Febriyanda

NIM. 180604012

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi

pada Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 19720481999031005

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 19720481999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Andri Febriyanda

NIM: 180604012

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Ilmu Ekonomi


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Januari 2022 M


12 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Sekretaris


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005


Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

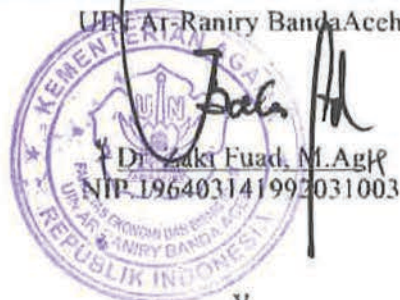
Penguji I

Penguji II


Dr. Maimun, SE., Ak. M.Si
NIP. 1970091719970031002


Dr. Azwar, M.Si
NIP. 197306161998011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Andri Febriyanda
NIM : 180604012
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Email : 180604012@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul :

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2021

Penulis

Andri Febriyanda
NIM: 180604012

Mengetahui:
Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II

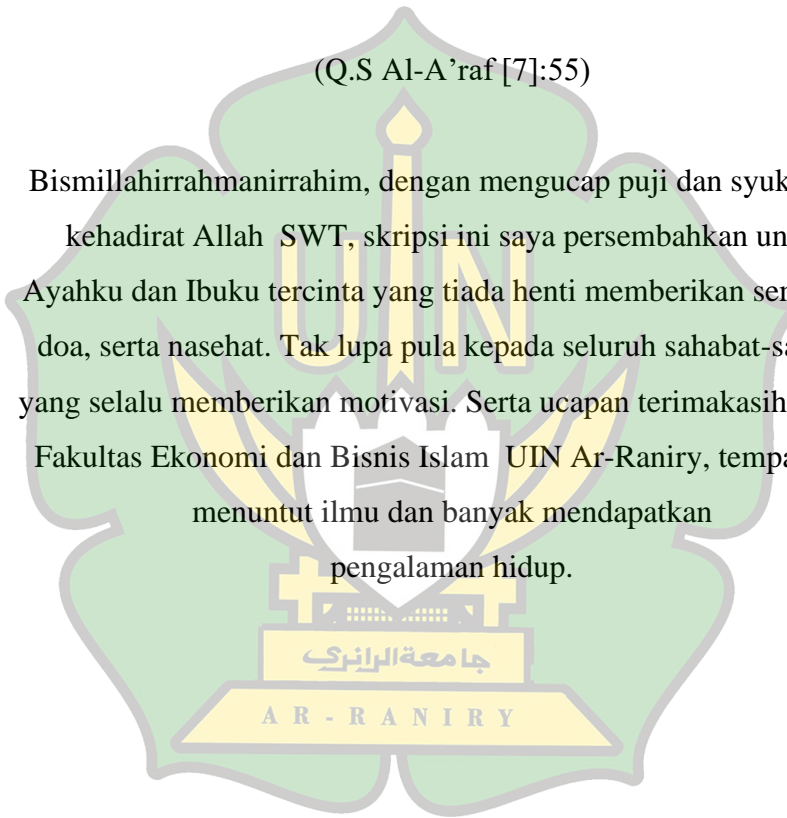
Rachmi Meutia, M.Sc
NIP.198803192019032013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

(Q.S Al-A’raf [7]:55)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk: Ayahku dan Ibuku tercinta yang tiada henti memberikan semangat, doa, serta nasehat. Tak lupa pula kepada seluruh sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi. Serta ucapan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat saya menuntut ilmu dan banyak mendapatkan pengalaman hidup.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PULAU SUMATERA**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini belum mencapai tahap kesempurnaan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi sekaligus pembimbing I dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai pencetakan skripsi.
4. Rachmi Meutia, M.Sc selaku asisten Laboratorium Ilmu Ekonomi sekaligus pembimbing II yang kesabarannya dan juga begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Maimun, SE., Ak. M.Si selaku penguji I dan Dr. Azwar, M.Si selaku penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Cut Elfida, S.H.I., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi. Seluruh dosen, karyawan, serta staf akademik maupun tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Alm Marzuki dan Ibu Irma Deliani, yang selalu mendoakan dan

memeberikan semangat serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 terutama untuk Siti Afifa, Rizki Oktavriansyah, Yori NovilaYusda, Rossy Ammalia dan Ike Irviana Putri yang turut membantu serta memberikan saran-saran serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat Jovan Alwayd Nasution, Ilham Akbar Farali, M.Aldi dan Alfiansyah yang selalu memberikan dukungan materil dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman organisasi GenerasiBaru Indonesia (GenBI) Komisariat UIN Ar-Raniry terutama yang turut memberikan saran-saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Ekonomi dan masyarakat terkait.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya dapat mendoakan semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga amalnya diterima disisi Allah SWT sebagai amal yang mulia. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 November 2021

Penulis,

Andri Febriyanda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-afal/raudatul afal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
*al-madinah al-munawwarah/
al-madinatul munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Andri Febriyanda
NIM : 180604012
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
Pembimbing II : Rachmi Meutia M.Sc
Kata Kunci : Indeks Williamson, Ketimpangan Pembangunan, Sumber Daya Alam, Penanaman Modal Asing, Dana Alokasi Umum

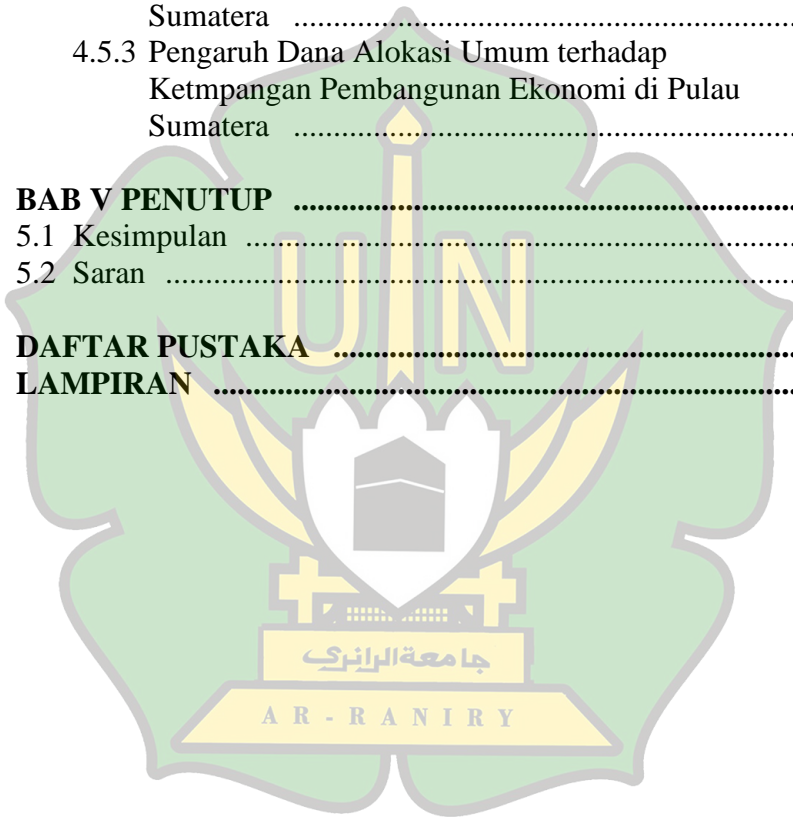
Ketimpangan terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik pada setiap daerah baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin melebar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SDA, PMA dan DAU terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data skunder setiap provinsi dari tahun 2011-2020. Analisis daya yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini adalah SDA berpengaruh positif dan signifikan, PMA memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020. Diharapkan kepada pemerintah agar memaksimalkan SDA, PMA dan DAU agar dapat menanggulangi permasalahan ketimpangan yang terjadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KERYA ILMIAH	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Pembangunan Ekonomi	18
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	19
2.2 Ketimpangan Pembangunan	24
2.2.1 Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan	24
2.2.2 Teori Ketimpangan Pembangunan	26
2.2.3 Pengukuran Ketimpangan Pembangunan	28
2.3 Sumber Daya Alam (SDA)	31
2.3.1 Definisi Sumber Daya Alam	31
2.3.2 Klasifikasi Sumber Daya Alam	32
2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)	33
2.4.1 Definisi Penanaman Modal Asing	33
2.4.2 Teori Penanaman Modal Asing	34

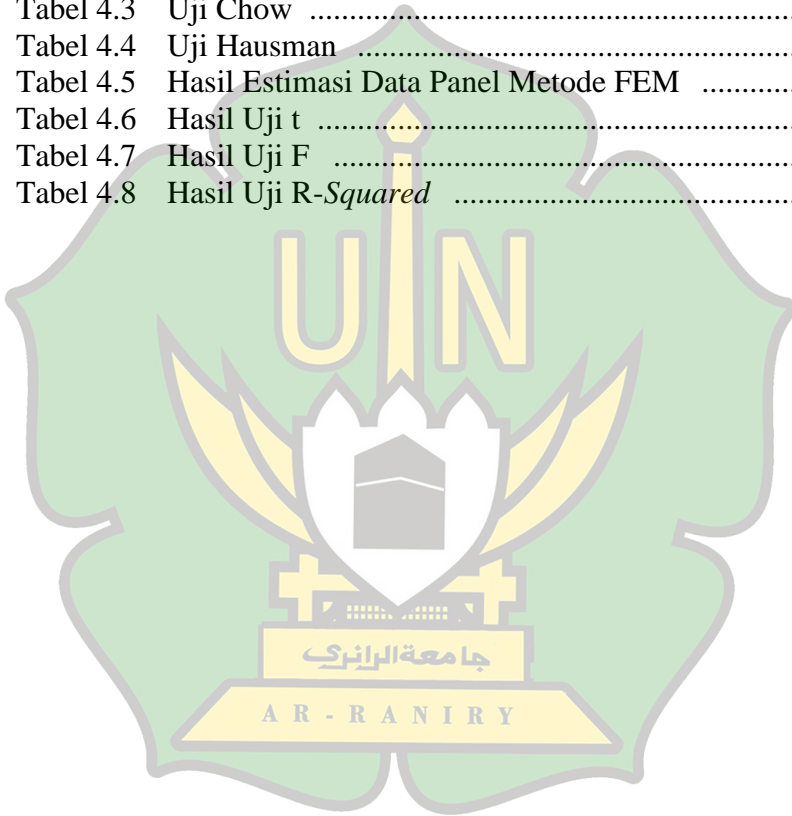
2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)	35
2.6 Penelitian Terkait	36
2.7 Kerangka Berfikir	46
2.7.1 Hubungan Sumber Daya Alam terhadap Ketimpangan Pembangunan	46
2.7.2 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pembangunan	46
2.7.3 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan	47
2.8 Hipotesis Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Jenis dan Sumber Data	50
3.3 Sampel	51
3.4 Variabel Penelitian	51
3.4.1 Klasifikasi Variabel	51
3.4.2 Definisi Operasional Variabel	52
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	53
3.5.1 Indeks Williamson	53
3.5.2 Regresi Data Panel	54
3.5.3 Model Estimasi Data Panel	56
3.5.4 Pemilihan Model Data Panel (Uji Spesifikasi Model)	59
3.6 Pengujian Hipotesis Penelitian	62
BAB IV PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.2 Temuan Hasil Penelitian	71
4.2.1 Uji Chow	71
4.2.2 Uji Hausman	72
4.3 Model Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	73
4.4 Pengujian Hipotesis	75
4.4.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	75
4.4.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	78

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi R^2 (<i>R-squared</i>)	80
4.5 Analisis Ekonomi	81
4.5.1 Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera	81
4.5.2 Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera	83
4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera	84
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95



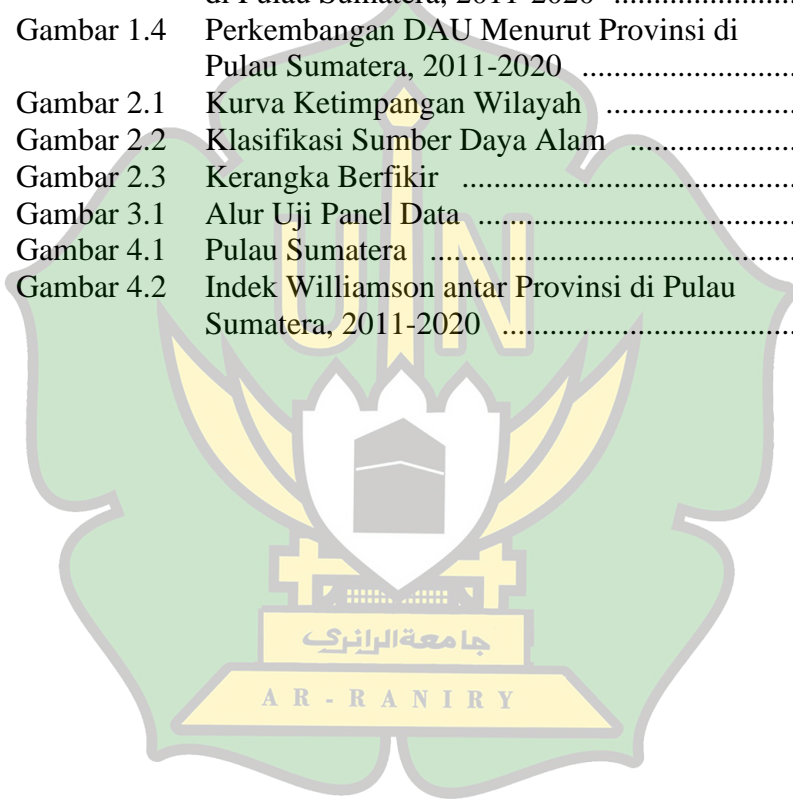
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait	42
Tabel 4.1	Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	69
Tabel 4.2	Kategori Ketimpangan Pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	70
Tabel 4.3	Uji Chow	71
Tabel 4.4	Uji Hausman	72
Tabel 4.5	Hasil Estimasi Data Panel Metode FEM	74
Tabel 4.6	Hasil Uji t	77
Tabel 4.7	Hasil Uji F	79
Tabel 4.8	Hasil Uji R-Squared	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	3
Gambar 1.2	Kontribusi SDA terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	8
Gambar 1.3	Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	10
Gambar 1.4	Perkembangan DAU Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	12
Gambar 2.1	Kurva Ketimpangan Wilayah	27
Gambar 2.2	Klasifikasi Sumber Daya Alam	33
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir	48
Gambar 3.1	Alur Uji Panel Data	62
Gambar 4.1	Pulau Sumatera	66
Gambar 4.2	Indek Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020	67



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
SDA	: Sumber Daya Alam
PMA	: Penanaman Modal Asing
DAU	: Dana Alokasi Umum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kemenuk	: Kementerian Keuangan
CEM	: <i>Common Effect Model</i>
FEM	: <i>Fixed Effect Model</i>
REM	: <i>Random Effect Model</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Common Effect Model (CEM)</i>	95
Lampiran 2	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	96
Lampiran 3	<i>Random Effect Model (REM)</i>	97
Lampiran 4	Uji Chow	98
Lampiran 5	Uji Hausman	99



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi salah satu proses kegiatan yang sangat penting bagi setiap negara, karena pada era globalisasi sekarang yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja tetapi juga berdampak pada bidang-bidang lain seperti sosial, budaya, politik dan lainnya. Pembangunan merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan penambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara yang semakin baik atau mapan (Hasyim, 2016).

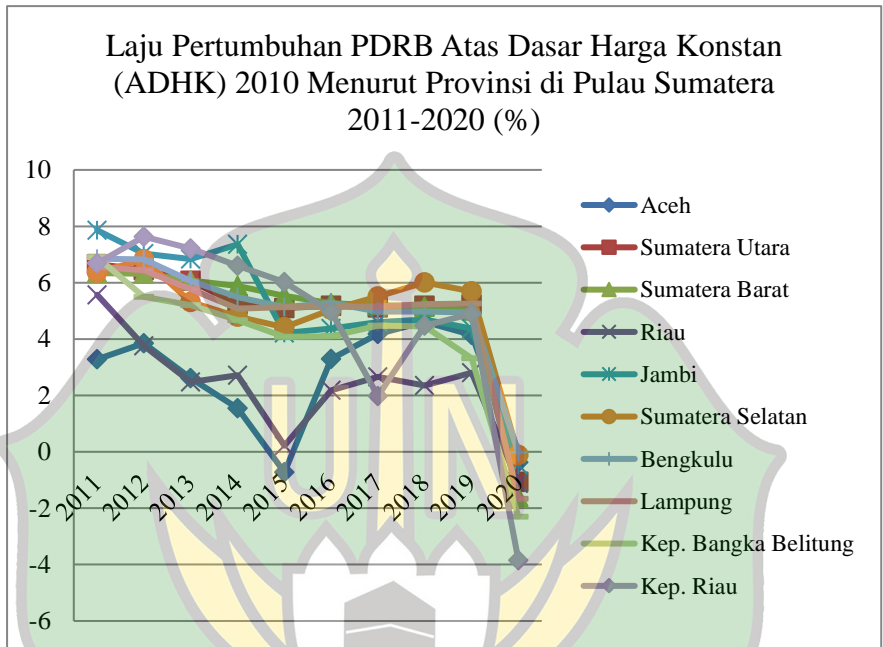
Proses pembangunan pada suatu negara menurut Goulet (dikutip dalam Todaro & Smith, 2011) paling tidak terdapat tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki. Ketiga nilai ini meliputi kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Ketiga komponen ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang fundamental ataupun yang mendasar bagi kehidupan manusia.

Pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan

pembangunan ekonomi. Menurut para ekonom (dikutip dalam Hasyim, 2016) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Walaupun Indonesia memiliki sebuah program pembangunan nasional yang sama namun, tetap saja daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembangunan ekonomi di wilayahnya. Permasalahan pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki sepuluh provinsi dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain, mulai dari kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan lainnya. Perbedaan tersebut berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsinya berikut merupakan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Pulau Sumatera.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020



Sumber: BPS (2021)

Laju pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera mengalami naik turun, terutama terjadi penurunan yang cukup drastis di provinsi Aceh dan Riau. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mengambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada periode 2011-2018. Namun memasuki tahun 2019 sejak pandemi mulai menyebar, PDRB Indonesia mengalami penurunan dan pada tahun 2020 angka PDRB seluruh provinsi menyentuh angka minus, hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia, dan

menyebabkan perekonomian Indonesia menurun drastis dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi regional dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan untuk pembangunan ekonomi dapat dilihat dari perubahan taraf hidup masyarakat. Namun, pada kenyataannya suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik belum menjamin pembangunan ekonomi di negara tersebut juga ikut membaik, hal yang seperti ini terjadi karena pemerintah hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi saja sehingga mengenyampingkan aspek-aspek yang mengganggu proses pembangunan. Keadaan perekonomian yang seperti ini biasa disebut dengan perekonomian semu. Bahkan hal seperti ini masih terjadi hingga sekarang, menurut Ekonom *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF) (2021) mengungkapkan bahwa “pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan yang semu”. Hal ini disebabkan pertumbuhan yang tinggi masih belum dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pendapat dari *World Bank*(2016) dalam artikelnya menyatakan “dalam 15 tahun terakhir (2000-2015), Indonesia mengalami pertumbuhan yang kuat, namun pertumbuhan tersebut hanya dapat dinikmati oleh 20% penduduk saja, sedangkan 80% penduduk rawan merasa tertinggal”. Sehingga pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang akan bermuara pada ketimpangan dalam

kehidupan bermasyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata tujuan akhir dari pembangunan ekonomi.

Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Hidayat dan Rahayu (2018) dimana menurut mereka selama ini banyak negara yang sedang berkembang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi permasalahan pembangunan masih banyak yang belum terpecahkan. Salah satunya masih terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi di kalangan masyarakat yang dimana masyarakat miskin tetap miskin dan masyarakat kaya semakin kaya, ini menunjukkan terjadinya *trickle up effects* bukan *trickle down effect* yang seharusnya menjadi salah satu landasan dalam mengambil kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan.

Masalah ketimpangan pembangunan adalah masalah historis yang kerap kali dihadapi oleh setiap negara mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan global (Firdaus, 2013). Isu dari ketimpangan pembangunan ekonomi dapat terjadi pada setiap negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara tertinggal. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki perbedaan kandungan akan sumber daya alam dan keadaan demografisnya, sehingga daerah yang kaya akan sumber daya akan relatif lebih maju dari pada daerah yang minim sumber daya. Menurut Williamson pada awal periode, pembangunan hanya terkonsentrasi pada satu titik disebuah negara, seiring berkembangnya perekonomian di negara tersebut, pertumbuhan ekonomi menyebar hingga ke daerah-daerah yang menjadi pemasok

sumber daya dan akan membuat tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznet (dikutip dalam Todaro & Smith, 2011) yang dimana menurutnya pada awal mula pembangunan ketimpangan akan tinggi, namun pada periode selanjutnya akan cenderung membaik. Hubungan ini dapat diilustrasikan pada Kurva U terbalik.

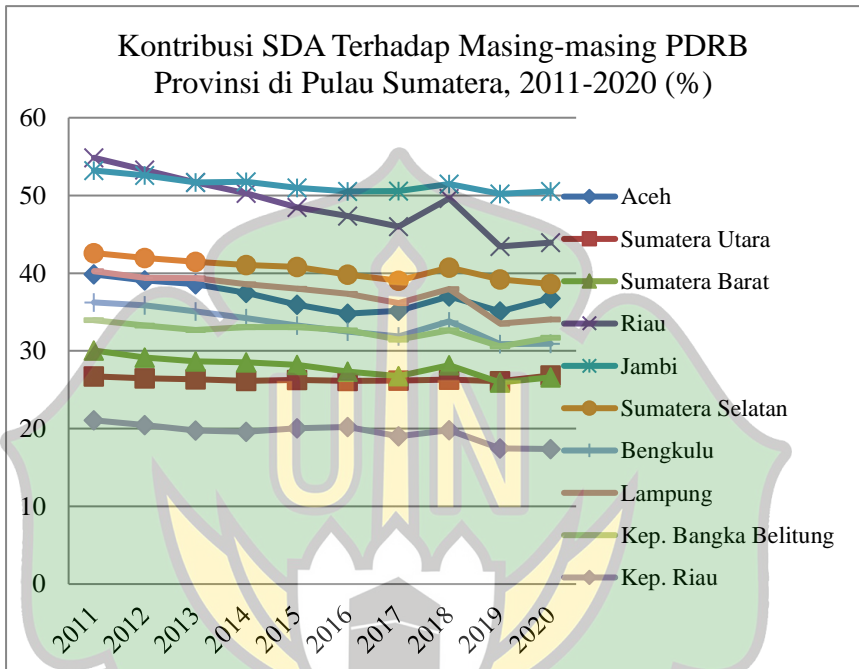
Ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan yang serius. Menurut Detiknews (2021) “berdasarkan data BPS, selama satu dasawarsa terakhir tercatat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2014” tingkat ketimpangan di Indonesia tercatat kembali naik CNN (2020) dan REPUBLIKA (2021) menyatakan “BPS mencatat jurang ketimpangan penduduk di Indonesia melebar pada September 2020”. Tingkat ketimpangan juga terus meningkat selama tahun 2021, Kontan(2021) “BPS mencatat, rasio gini per Maret 2021 sebesar 0,384 atau naik dari Maret 2020 yang hanya sebesar 0,381”. Keadaan yang seperti ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Ketimpangan merupakan permasalahan yang kompleks (World Bank, 2016) dimana ketimpangan yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua variabel saja. Menurut Sjafrizal (2012) faktor utama yang memicu terjadinya ketimpangan antar wilayah sebagai berikut; (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam (SDA), (2) Perbedaan kondisi demografis, (3) Kurang

lancarnya mobilitas barang dan jasa, (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Sumber daya alam memiliki keterkaitan dengan proses produksi, dimana dalam pandangan Adam Smith, sumber daya alam merupakan faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu Purba et al. (2020). Sehingga dalam pengelolaanya juga perlu diperhatikan agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang besar untuk proses pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber daya alam yang tersebar di dunia ini terbentuk dan berkembang dengan faktor yang berbeda, mulai dari faktor geologis, iklim dan geomorfologi (Kelas Pintar, 2019), sehingga setiap daerah pasti akan memiliki sumber daya yang berbeda-beda (Maddinsyah, Kustini, & Syakhrial, 2018). Penyebaran sumber daya alam juga berbeda-beda di setiap daerah. Pada suatu daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikembangkan akan memberikan pengaruh yang besar dalam proses pembangunan ekonomi di daerah tersebut karena secara ekonomis dapat digunakan dalam proses produksi sehingga akan meningkatkan PDRB di daerah tersebut. Sebaliknya suatu daerah yang hanya sedikit memiliki kandungan sumber daya alam dan sulit dalam pengembangannya akan memberikan potensi yang relatif sedikit terhadap pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Gambar 1.2 Kontribusi SDA terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020



Sumber: BPS, 2021 (Data Diolah)

Pada gambar 1.2 dapat kita lihat di Pulau Sumatera, Provinsi yang memiliki kontribusi SDA terbesar terhadap PDRB yaitu Provinsi Jambi yaitu mencapai rata-rata 51,35%. Di Provinsi Jambi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang menyumbang sebagian besar untuk PDRB dan disusul dengan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sektor SDA-nya paling sedikit memberikan kontribusi terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan pada Provinsi Kepulauan Riau sektor yang menompang

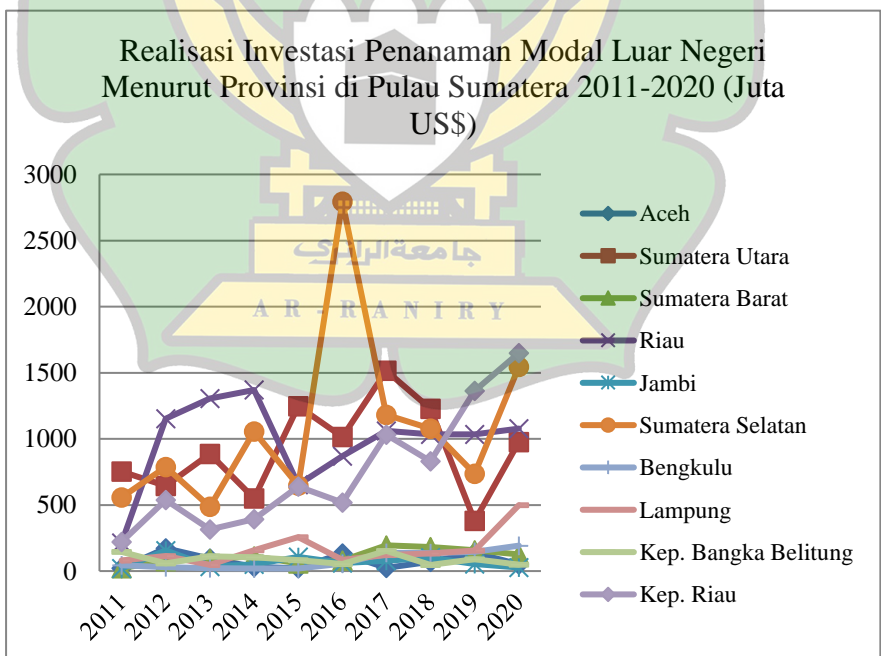
perekonomiannya adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Kontruksi.

Negara berkembang juga memerlukan modal (investasi) dalam melakukan proses produksi di wilayah yang kurang berkembang dan minim sumber daya agar terlepas dari jebakan ketimpangan pembangunan (*vicious circle of regional underdevelopment*). Investasi merupakan salah satu faktor yang dianggap dapat memutus mata rantai ketimpangan pembangunan. Dana investasi menurut sumbernya terbagi menjadi dua macam, yaitu; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 9 mendefinisikan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik seluruhnya menggunakan modal asing ataupun berkongsi dengan penanaman modal dalam negeri. PMA merupakan salah satu sumber dana yang aliran modalnya relatif stabil dan memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya (Kambono & Marpaung, 2020). Disamping memiliki resiko yang lebih kecil, PMA juga tidak terlalu berpengaruh terhadap gejolak fluktuasi mata uang ataupun beban bunga yang besar.

Menurut Jhingan (2012) Penanaman Modal Asing (PMA) bukan hanya memberikan modal terhadap negara bersangkutan tetapi juga memperkaya negara yang bersangkutan, mendorong

terjadinya pertukaran keterampilan dan masuknya teknologi-teknologi yang berasal dari negara pemilik modal, sehingga dengan adanya PMA ini turut membantu negara yang bersangkutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pernyataan Hodijah (2015) dimana dia menyatakan bahwa selain berperan sebagai arus modal masuk, investasi asing memiliki *Spoillover Effect* berupa transfer teknologi asing, kemampuan manajerial, dan perbaikan daya saing secara internasional bagi perusahaan domestik.

Gambar 1.3 Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020



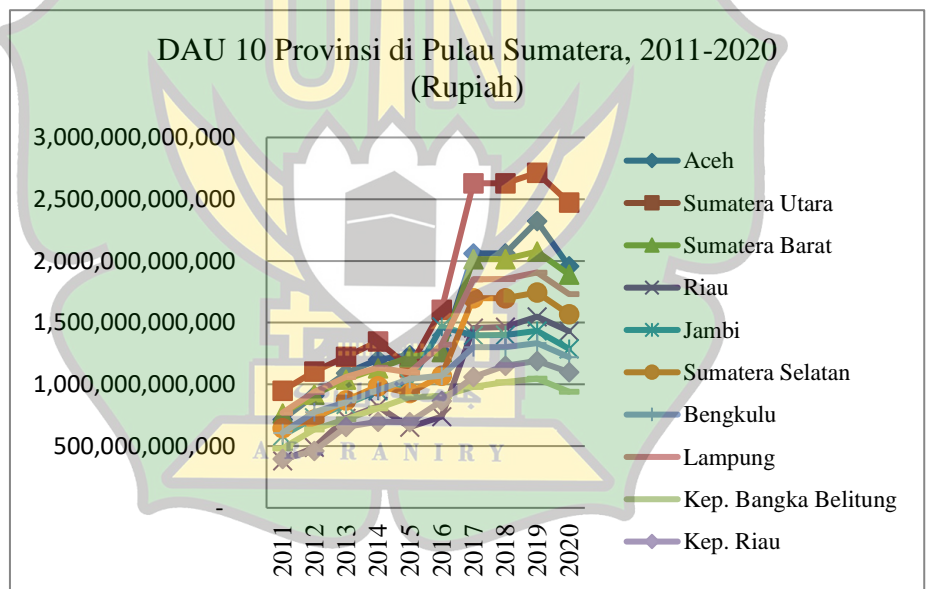
Sumber: BPS (2021)

Perkembangan PMA di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di setiap provinsinya. Investasi penanaman modal luar negeri pada provinsi Kepulauan Riau walaupun mengalami fluktuasi di setiap tahunnya namun menunjukkan *trend* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan Sumatera Selatan pernah menjadi provinsi yang memperoleh investasi penanaman modal luar negeri tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2793,5 Juta USD dan merupakan investasi terbesar dalam sepuluh tahun terakhir pada provinsi yang berada di pulau Sumatera.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia juga terjadi karena sistem pemerintahan Indonesia pada mulanya bersifat sentralisasi, namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem yang bersifat desentralisasi, Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, dituju agar mencapai kinerja yang efisien dalam proses pembangunan. Sehingga ketimpangan pembangunan akan dapat berkurang karena pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran didaerahnya masing-masing. Namun pembangunan di daerah juga tidak terlepas dari peran pemerintah pusat yaitu dengan mendistribusikan dana transfer kepada daerah berupa Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi khusus dan Dana

alokasi umum. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rachim, 2015). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan memiliki porsi terbesar diantara ketiga dana transfer umum lainnya.

Gambar 1.4 Perkembangan DAU Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu (2021)

Distribusi DAU oleh pemerintah pusat pada setiap provinsi di Pulau Sumatera cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Provinsi yang memperoleh DAU terbesar adalah Provinsi

Sumatera Utara dan diikuti oleh Provinsi Aceh serta Sumatera Barat. Sementara Kepulauan Riau menjadi provinsi yang memperoleh DAU paling sedikit selama periode 2011-2019. Namun memasuki tahun 2020 dikarenakan pandemi DAU pada setiap provinsi mengalami penurunan 200 juta – 400 juta.

Hasil Penelitian dari Nangarumba (2015) menunjukkan bahwa PDRB dari sektor pertanian, dan kredit investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini juga serupa dengan temuan oleh Ilham & Pangaribowo (2017) dimana sektor pertanian berpengaruh negatif dan tidak signifikan, namun PMA berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2017) dimana peningkatan kontribusi sumber daya alam akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Timur

Penelitian serupa yang diperoleh oleh Didia (2016) menyatakan bahwa secara langsung investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan, hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Sasongko (2021) dimana variabel PMA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Namun bertolak belakang dengan Andhiani, Erfit, & Bhakti (2018) dimana investasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan baik secara parsial maupun secara simultan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, Zulgani, & Rosmeli (2017) dimana secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan, DAU, DAK dan DBH mampu menjelaskan ketimpangan sebesar 80%, namun secara parsial DAU memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Berbeda dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Safitri, Junaidi, & Erfit (2021) variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang menyatakan ketimpangan di Indonesia semakin melebar membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yang disusun sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Sumber Daya Alam (SDA) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020 ?
2. Berapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020 ?

3. Berapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020 ?
4. Berapa besar pengaruh Sumber Daya Alam (SDA), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Sumber Daya Alam (SDA) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh Sumber Daya Alam (SDA), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk peneliti, sebagai penambah ilmu dan pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian juga dapat menjadi salah satu referensi dalam proses pembelajaran menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan.
2. Untuk penelitian kedepannya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
3. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah yang ada di Pulau Sumatera, dalam penyusunan strategi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1.5 Sitematika Penelitan

Sistematikan penelitian bertujuan agar penelitian lebih teratur dan mepermudah pembaca. Berikut adalah sistematika penelitian yang digunakan pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga terdapat sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berupa uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema proposal.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta dengan justifikasinya, jenis penelitian, lokasi, jenis data serta metode analisis penelitian yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian, yang dimulai dengan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan menguraikan hasil analisis statistik deskriptif dan inferensial.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian serta saran-saran ataupun rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah kata yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perubahan ekonomi dalam jangka panjang. Secara umum pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan PDRB suatu daerah secara terus menerus atau jangka panjang. Menurut Portes (dikutip dalam Nurman, 2015) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi mengharuskan perubahan dalam struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, serta perubahan sikap, kebiasaan dan kepercayaan (Todaro & Smith, 2011). Namun disisi lain pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan percepatan pertumbuhan ekonomi, persoalan ketimpangan pendapatan, permasalahan kekurangan pangan, pengentasan kemiskinan, serta keterbatasan sumber daya.

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Terdapat beberapa teori mengenai pembangunan yang dicetus oleh para ahli ekonomi. berikut beberapa contoh teori pembangunan ekonomi, yaitu:

a. Teori Akumulasi Modal Harrod-Domar

Purnamasari (2019) menjelaskan Teori yang dicetus oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar tentang tabungan dan investasi. Teori ini menyatakan bahwa dalam proses pembangunan perlu adanya ketersediaan modal dan investasi atau penanaman modal. Modal dan investasi sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan sebagai salah satu pendorong dalam kegiatan produksi. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan dapat meningkatkan lapangan kerja di masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. berikut merupakan badan dari teori Harrod Domar.

b. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Prawoto (2019) Teori Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi serta pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari desa harus dapat menyediakan upah subsisten dan upah “biaya pindah” agar tenaga kerja mau meninggalkan kampung halamannya. Teori ini juga membahas permasalahan pada negara berkembang, dimana terdapat dua sektor yang menjadi pokok permasalahannya, yaitu sektor

tradisional yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah namun memerlukan tenaga kerja yang banyak, dan sektor modern yang memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi dan dapat dijadikan sumber kapital.

c. Teori Pembangunan Rostow

Teori Pembangunan ini dipelopori oleh Walt Whitman Rostow, dalam teorinya Rostow menjelaskan tentang lima tahap pembangunan yaitu sebagai berikut (Subandi, 2014):

1) Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Tahap ini masyarakat digambarkan oleh Rostow sebagai masyarakat yang masih melakukan kegiatan produksi dengan cara tradisional baik dari segi alat yang digunakan maupun metode yang digunakan. Struktur masyarakat pada tahap ini sangat sulit berkembang dikarenakan faktor pendukung dalam kegiatan produksi masih sangat minim. Tidak hanya itu sikap masyarakat yang percaya akan hal-hal mistis yang tidak masuk akal juga masih sangat kental. Lanjutnya Rostow menyampaikan ciri-ciri dari masyarakat tradisional yaitu:

- a) Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas perpekerja masih sangat rendah dan sebagian dari masyarakatnya bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam.

2) Tahap Persyarakatan Lepas Landas (*The Precondition for Take Off*)

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan perekonomian pada tahap berikutnya. Diperlukan persiapan yang benar-benar matang agar dapat menjadi penopang untuk terus berkembang secara terus menerus dan berkesinambungan. Pada tahap ini dapat dibedakan menjadi dua ciri, yaitu:

- a) Tahapan yang merombak masyarakat tradisional lama yang telah ada. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara di Afrika, Asia Timur, Timur Tengah dan Eropa.
- b) Tahapan yang tidak merombak masyarakat tradisional lama yang telah ada. Seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

3) Tahap Lepas Landas (*Take Off*)

Tahap ini mulai terjadi perubahan pada sektor investasi yang dimana akan meningkat dan perubahan-perubahan diberbagai hal lainnya. Ciri-ciri tahap lepas landas adalah sebagai berikut:

- a) Terjadinya kenaikan pada sektor investasi dari 5% atau kurang menjadi 10% dari total produk nasional neto.
- b) Laju pertumbuhan sektor industri terjadi sangat pesat pada satu atau beberapa sektor.
- c) Terciptanya satu kerangka dasar politik, sosial dan institusional yang digunakan untuk pertumbuhan dan

perluasan di sektor modern dan potensi dari dampak eksternalitas diharapkan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus.

4) Tahap Menuju Kematangan (*The Drive of Marturity*)

Tahap ini akan ditandai dengan keadaan laju pertumbuhan perekonomian yang terus menerus tumbuh meskipun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuatif. Tahap ini juga dapat dilihat dari pengimplementasian teknologi-teknologi modern secara menyeluruh pada setiap sektor perekonomian. Tidak hanya itu tahap ini juga ditandai dengan munculnya industri-industri baru yang mengakibatkan industri-industri lama ditinggalkan. Keadaan ini akan terjadi kenaikan output karena pemakaian teknologi dalam kegiatan produksi yang akan berdampak pada barang yang sebelumnya diimpor, sekarang mampu diproduksi sendiri.

5) Tahap Konsumsi Tinggi (*The Age of High mass Consumption*)

Tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow yaitu tahap konsumsi tinggi. Pada tahap ini terjadi perubahan pada tingkat konsumsi masyarakat dikarenakan pendapatan riil perkapita meningkat hingga suatu titik masyarakat tidak hanya dapat membeli kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Pada sistem ketenagakerjaan juga berubah secara mendasar dikarenakan lapangan kerja yang tersedia di masyarakat cukup banyak. Rostow menyebutkan pada tahap ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat dalam persaingan, yaitu:

- a) Tujuan memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke negara lain.
 - b) Tujuan menciptakan suatu kemakmuran yang merata pada masyarakat melalui penerapan sistem pajak progresif dimana semakin besar pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin besar pajak yang dibebankan. Begitupula sebaliknya.
 - c) Tujuan meningkatkan konsumsi masyarakat yang awalnya hanya mengkonsumsi barang kebutuhan pokok (primer) menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.
- d. Teori Thomas Robert Malthus

Jhingnan (2012) dalam bukunya menyatakan Teori Thomas Robert Malthus, dimana Malthus berpendapat bahwa proses pembangunan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Menurutnya, proses pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dari naik turunnya perekonomian. Proses akumulasi modal merupakan salah satu faktor terpenting terhadap proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya Malthus menyampaikan beberapa saran untuk proses pembangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terciptanya pertumbuhan yang seimbang diberbagai sektor ekonomi
- 2) Pendistribusian kesejahteraan dan kepemilikan atas tanah secara adil
- 3) Melakukan perluasan perdagangan baik perdagangan internal maupun perdagangan eksternal.

2.2 Ketimpangan Pembangunan

2.2.1 Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan terjadi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Sjafrizal (2012) ketimpangan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam oleh setiap daerah merupakan salah satu yang dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan antardaerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini pasti akan mempengaruhi aktivitas produksi pada masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam dalam jumlah yang lumayan dapat menghasilkan dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang relatif lebih murah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sedangkan daerah yang memiliki sedikit kandungan sumber daya alam perlu memakan sedikit biaya yang akan meningkatkan biaya produksi suatu barang atau jasa yang dapat membuat daya saing menjadi lemah, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menjadi lebih lamban.

b. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis disini meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam etos kerja yang dipegang oleh masyarakat, dan perbedaan tingkat pendidikan dan

kesehatan pada masyarakat, semua hal tersebut merupakan faktor demografis yang dapat memicu terjadinya ketimpangan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah yang memiliki kondisi demografis yang baik kebanyakan akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut tentu akan menjadi salah satu pendorong terhadap peningkatan investasi yang akan menyebabkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan ikut meningkat. Sebaliknya jika kondisi demografis di daerah tersebut kurang baik, ini akan berdampak pada tingkat produktivitas kerja masyarakat yang jauh lebih rendah dan tentu saja para investor tidak akan melakukan investasi, sehingga akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat di daerah tersebut.

c. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa akan berakibat pada kelebihan produksi yang tidak dapat di perdagangkan ke daerah yang membutuhkan. Akibatnya daerah yang memiliki kekurangan baik barang produksi ataupun jasa akan sulit mendorong proses pembangunan di daerahnya.

d. Konsentrasi kegiatan ekonomi suatu wilayah

Aktivitas ekonomi akan terfokus pada daerah yang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik, daerah yang

memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah, dan kualitas demografis lebih baik dengan kuantitas yang cukup. Daerah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi dapat membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut jauh lebih cepat yang akan mendorong proses pembangunan. Sebaliknya daerah yang memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi yang rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi akan melambat dikarenakan tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat pendapatan yang rendah sehingga ikut menghambat proses pembangunan.

e. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana pembangunan ini dapat diperoleh dari pemerintah maupun swasta. Daerah yang memperoleh dana yang lebih besar akan cenderung memiliki ketimpangan yang jauh lebih rendah. Sebaliknya daerah yang memperoleh dana yang lebih rendah maka ketimpangan di daerah tersebut cenderung tinggi.

2.2.1 Teori Ketimpangan Pembangunan

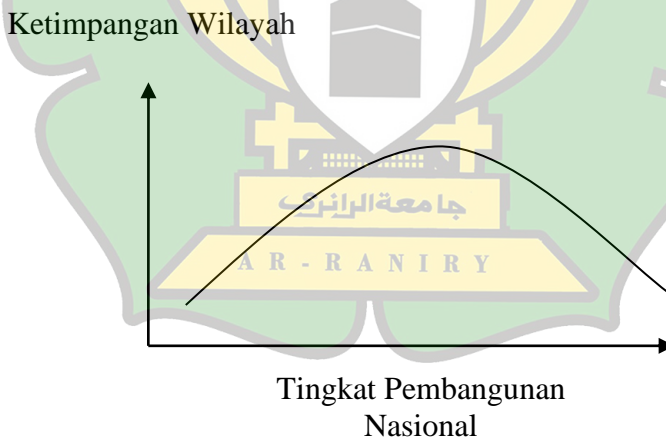
Ketimpangan pembangunan merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah proses pembangunan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan ketimpangan pembangunan, yaitu:

a. Hipotesis Neo-Klasik

Sjafrizal (2012) dalam bukunya menjelaskan Hipotesis Neo-Klasik dimana Douglas C North merupakan orang yang pertama kali membahas ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Pada teori ini

muncul sebuah hipotesis tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu hipotesis tersebut sekarang lebih dikenal dengan hipotesis Neo Klasik. Dalam Hipotesis Neo Klasik dijelaskan bahwa pada periode awal pembangunan di suatu negara, tingkat ketimpangan pembangunan akan tinggi sampai pada titik maksimal. Setelah itu pada periode selanjutnya pembangunan akan terus berjalan sedangkan tingkat ketimpangan akan terus menurun. Dengan demikian kurva ketimpangan pembangunan berbentuk huruf U terbalik atau berbentuk seperti lonceng.

Gambar 2.1 Kurva Ketimpangan Wilayah



Sumber : Sjafrizal (2012)

b. Teori Keterbelakangan dan Pembangunan Ekonomi

Teori ini pelopori oleh Myrdal dalam teorinya dia menjelaskan ketimpangan pembangunan menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* untuk melihat pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar (Jhingan, 2012). *Spread effect* (dampak sebar) dapat diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (*favourable effect*), efek ini akan membuat aliran kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan menyebar ke daerah terbelakang. *Backwash effect* (dampak balik) yang memiliki arti sebagai pengaruh yang berakibat kerugian (*infavourable effect*) efek ini akan membuat daerah pusat menyerap segala kegiatan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi hanya berfokus pada daerah pusat. Daerah yang memiliki *backwash effect* yang lebih besar akan berpotensi memiliki ketimpangan pembangunan antar wilayah.

2.2.2 Pengukuran Ketimpangan Pembangunan

Pengukuran ketimpangan dapat diukur dengan beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan, yaitu sebagai berikut:

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson ini merupakan salah satu alat yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks ini digunakan oleh Jeffrey G, Williamson saat

meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan pada tingkat regional suatu negara. Formulasi dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2012):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i / n}}{\bar{Y}} \quad (2.1)$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita wilayah i (provinsi)

\bar{Y} = PDRB perkapita seluruh wilayah

f_i = Jumlah penduduk wilayah i (provinsi)

n = Jumlah penduduk seluruh wilayah

b. Indeks Theil

Indeks Theil juga salah satu dari alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah. PDRB per kapita dan jumlah penduduk pada tiap wilayah merupakan data yang dibutuhkan dalam mencari Indeks Theil. Nilai Indeks Theil memiliki rentang antara 0-1, ini memiliki arti bahwa saat nilai Indeks Theil mendekati 1 (satu), maka tingkat ketimpangan didaerah tersebut semakin tinggi. Begitu sebaliknya saat nilai Indeks Theil mendekati 0 (nol) , maka tingkat ketimpangan didaerah tersebut semakin rendah. Adapun formulasi dari Indeks Theil yaitu (Sjafrizal, 2012):

$$T_d = \sum_{i=j}^n \sum_{i=j}^n \{y_{ij}/Y\} \log \left[\frac{\{y_{ij}/Y\}}{\{n_{ij}/N\}} \right] \quad (2.2)$$

Keterangan :

Y = Jumlah PDRB perkapita seluruh wilayah (Provinsi) j

Y_i = PDRB perkapita Kabupaten/Kota i di Provinsi j

N = Jumlah Penduduk seluruh Provinsi

n_{ij} = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i Provinsi j

c. Konsep PDRB per Kapita Relatif

Konsep PDRB per Kapita Relatif juga dapat dilakukan dengan menggunakan untuk menghitung tingkat ketimpangan. Formulasi dari konsep PDRB per Kapita relatif digunakan dalam penelitian (Yusica, Malik, & Arifin, 2018), yaitu sebagai berikut:

$$I_{it} = \left| \frac{PDRB \text{ Kap Kab/Kota}_{it}}{PDRB \text{ Kap Provinsi}_{it}} - 1 \right| \quad (2.3)$$

Keterangan :

I_{it} = Ketimpangan antar Kab/Kota i tahun t

PDRB Kap Kab/Kota_{it} = PDRB perkapita Kab/Kota i tahun t

PDRB Kap Provinsi_{it} = PDRB perkapita Provinsi tahun t

2.3 Sumber Daya Alam (SDA)

2.3.1 Definisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi potensial, baik berupa yang terdapat di litosfer (tanah), hidrosfer (air) dan atmosfer (udara) yang dapat menjadi manfaat bagi manusia (Purba, et al., 2020). Dalam ekonomi, sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai ekonomi. Rees dikutip dalam Fauzi (2006) mengatakan bahwa sesuatu sumber daya harus memiliki dua kriteria, yaitu:

- a. Harus ada ilmu pengetahuan, teknologi dan skill dalam memanfaatkannya.
- b. Harus ada permintaan terhadap sumber daya tersebut

Jika kedua kriteria di atas tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai barang sumber daya alam melainkan barang netral. Namun bukan berarti barang netral tersebut tidak dapat menjadi barang sumber daya alam, saat barang netral tersebut pemanfaatannya memerlukan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan juga ada permintaannya maka barang tersebut dapat menjadi barang sumber daya alam.

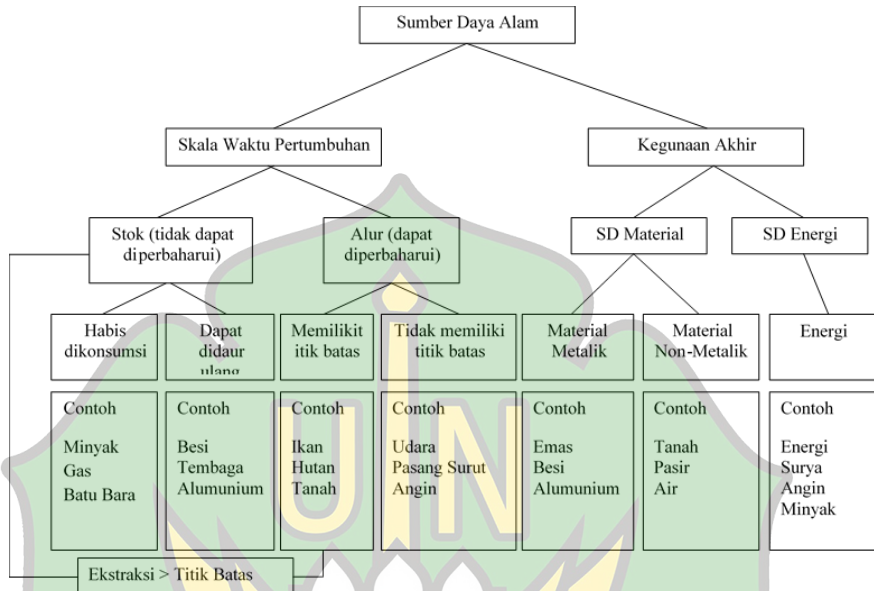
Sumber daya alam dan ilmu ekonomi sudah memiliki hubungan cukup lama. Pada masa Adam Smith konsep sumber daya alam sudah memiliki kaitan terhadap proses produksi. Dalam pandangan Adam Smith, sumber daya alam merupakan faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu (Purba, et al., 2020).

2.3.2 Klasifikasi Sumber Daya Alam

Secara umum sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu (Suparmoko, 2015):

- a. Pertama, kelompok sumber daya alam yang terbatas, dimana pemanfaatannya akan mengurangi cadangan sumber daya alam itu. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*exhaustible resources*) sumber daya alam yang termasuk kelompok ini antara lain sumber daya mineral, logam, minyak, dan gas bumi.
- b. Kedua adalah sumber daya alam yang jumlah kuantitasnya berubah sepanjang waktu. Dengan kata lain sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini terbagi menjadi dua kelompok lagi yaitu yang memiliki titik kritis seperti ikan, hutan dan tanah, serta kelompok yang tidak memiliki titik kritis seperti udara, angin dan sinar matahari.

Gambar 2.2 Klasifikasi Sumber Daya Alam



Sumber : Fauzi (2006)

2.4 Penanaman Modal Asing

2.4.1 Definisi Penanaman Modal Asing

Penanaman modal merupakan sebuah langkah awal dalam proses pembangunan. Penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi, nilai investasi yang tinggi akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara begitu pula sebaliknya nilai investasi yang kecil akan menghambat proses pembangunan yang akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di negara tersebut. Menurut Kambono & Marpaung (2020) Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan

salah satu sumber dana yang aliran modalnya relatif stabil dan memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 9, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik seluruhnya menggunakan modal asing ataupun berkongsi dengan penanaman modal dalam negeri.

2.4.2 Teori Penanaman Modal Asing

Ardiansyah (2015) menyatakan terdapat beberapa teori ekonomi yang membahas tentang investasi, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Klasik dan Neo Klasik

Dalam teori ini disampaikan bahwa penanaman modal asing secara menyeluruh menguntungkan negara yang memperoleh modal dari segi ekonomi. Penanaman modal asing dapat mendorong terjadinya pertukaran teknologi, keterampilan manajemen dan pemasaran, teknik produksi dan pelatihan-pelatihan pekerja.

b. Teori Penengah

Teori ini menyatakan bahwa negara-negara harus dapat merumuskan dan menyusun kebijakan untuk kepentingan pada masyarakatnya. Teori ini menekankan pada peran pemerintah dalam strategi pembangunan ekonomi yang terjadi di negara berkembang.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rachim, 2015). Dana alokasi umum merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era reformasi. Pelaksanaan desentralisasi dimulai sejak 1 Januari 2001 dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Walaupun telah berlaku desentralisasi fiskal mulai tahun 2001 pemerintah pusat tidak lepas tangan begitu saja terhadap pemerintah daerah.

Dana alokasi umum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dengan memberikan bantuan dana kepada daerah yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. Dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat diberikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4, dimana provinsi memperoleh sebesar 10% sedangkan kabupaten/kota memperoleh sebesar 90%.

2.6 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Sasongko (2021) dengan judul Ketimpangan Pembangunan Regional dan Investasi di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan, serta variabel PMA dan PMDN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara tergolong pada tingkat menengah yaitu berkisar antara 0,341%-0,556%. Dan dari hasil uji data panel, variabel PMA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan PMDN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

Temuan yang dilakukan oleh Syaripuddin, Semmaila, & Aminuddin (2011) yang menggunakan variabel Algoterasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia dalam melihat pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Sulawesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian ini juga termasuk penelitian yang bersifat asosiatif jika dilihat berdasarkan tingkat eksplanasinya. Untuk melihat tingkat

ketimpangan pembangunan ekonomi peneliti menggunakan metode Indeks Entropy Theil dan menggunakan Analisis Regresi Data Panel. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Algoterasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan dan memiliki nilai positif terhadap tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi. Sedangkan variabel Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan dan memiliki nilai negatif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sulawesi.

Penelitian berjudul Analisis Disparitas Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi) yang dilakukan oleh Safitri, Junaidi, & Erfit (2021). Penelitian ini menggunakan variabel ekonomi seperti Pertumbuhan Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi, sedangkan variabel non ekonomi menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif naratif. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Indeks Williamson untuk melihat tingkat ketimpangan pembangunan dan Regresi Data Panel untuk melihat pengaruh variabel terhadap tingkat ketimpangan pembanguna antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini memperoleh hasil rata-rata tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 0,18. Hasil analisis regresi data panel dari segi ekonomi menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dari segi non ekonomi hanya Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan variabel kemiskinan dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Andhiani, Erfit, & Bhakti (2018) menggunakan investasi, belanja pemerintah, alomerasi, dan tenaga kerja dari tahun 2011-2018 sebagai faktor yang mempengaruhi pada penelitian yang berjudul analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan, serta melihat pengaruh investasi, belanja pemerintah, alomerasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. Hasil penelitian ini yaitu investasi berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumataera.

Penelitian oleh Oktaviani, Zulgani, & Rosmeli (2017) dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Hasil dari penelitiannya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi, sedangkan secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Ilham & Pangaribowo (2017) penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat ketimpangan ekonomi menurut provinsi di Indonesia dan melihat juga pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kontribusi Sektor Pertanian, Kontribusi Sektor Manufaktur, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi peneliti menggunakan Indeks Entropy Theil dan untuk melihat pengaruh peneliti menggunakan analisis regresi panel. Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil bahwa daerah Indonesia memiliki daerah ketimpangan dengan kelas tinggi, sedang dan rendah. Dimana provinsi yang termasuk kelas tinggi adalah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Papua Barat yang memiliki rentang indeks ketimpangan antara 4%-9% , sedangkan provinsi yang termasuk kelas rendah adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang berkisar dibawah 0,05%. Variabel IPM dan TPT memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap

ketimpangan ekonomi di Indonesia, variabel kontribusi sektor manufaktur berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Variabel PMDN dan PMA memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Didia (2016) dengan judul Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Didia bahwa investasi berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur.

Merujuk pada penelitian Nangarumba (2015) yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi,

Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi untuk melihat ketimpangan pendapatan seluruh Provinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal dan Juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan, sehingga variabel yang berpengaruh positif adalah PDRB sektor industri. Sehingga, jika pemerintah ingin mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang ada melalui peningkatan PDRB Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Kredit Investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmeli (2015) dengan judul Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dimana penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa PMDN, PMA, dan Tenaga Kerja. Hasil yang diperoleh adalah variabel PMDN tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dengan arah yang negatif. Sedangkan PMA dan Tenaga kerja merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Wibowo & Sasongko, 2021)	Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel dan Analisis Indeks Williamson	Tingkat ketimpangan di Kabupaten Banjarnegara tergolong dalam tingkat menengah. Dan variabel PMA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: Penanaman Modal Asing (PMA)	Variabel Independen: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2	(Syaripuddin, Semmaila, & Aminuddin, 2021)	Penelitian ini menggunakan Analisis Indeks Entropy Theil dan Analisis Regresi Data Panel	Diperoleh hasil bahwa variabel Investasi tidak berpengaruh signifikan dan memiliki nilai negatif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sulawesi.	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: Investasi	Variabel Independen: Algoterasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2.1 – Lanjutan

3	(Safitri, Junaidi, & Erfit, 2021)	Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Indeks Williamson dan Analisis Regresi Data Panel	Tingkat Ketimpangan Pembangunan antar kab/kota di Provinsi Jambi tergolong rendah. Dan Hasil analisis regresi data panel dari segi ekonomi variabel Dana Perimbangan dan Investasi berpengaruh signifikan.	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Investasi	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan dan Tenaga Kerja
4	(Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018)	Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel dan Analisis Indeks Williamson	Investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. Namun, secara parsial investasi juga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera selama periode 2011-2015.	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: Realisasi Investasi	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan, Jumlah Penduduk, Realisasi Pengeluaran Pemerintah, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (sektor Industri), Tenaga Kerja

Tabel 2.1 – Lanjutan

5	(Oktaviani , Zulgani, & Rosmeli, 2017)	Penelitian ini menggunakan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) dan Indeks Williamson	Secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan, namun secara parsial DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi periode 2001-2016.	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: DAU	Variabel Independen: DAK dan DBH
6	(Ilham & Pangaribowo, 2017)	Penelitian ini menggunakan Indeks Entropy Theil dan Analisis Regresi Panel	Pada analisis regresi panel variabel Kontribusi Sektor Pertanian berpengaruh negatif tidak signifikan. Variabel PMA memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: Kontribusi Sektor Pertanian dan PMA	Variabel Dependen: IPM, TPT, Kontribusi Sektor Manufaktur dan PMDN

Tabel 2.1 – Lanjutan

7	(Didia, 2016)	Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda	Investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan di Kawasan Kedungsepur.	Variabel Dependen: Tingkat Ketimpangan Variabel Independen: Investasi	Variabel Dependen: Pertumbuhan PDRB per kapita Variabel Independen: IPM, TPAK, dan Jumlah Penduduk
8	(Nangarumba, 2015)	Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel	PDRB dari Sektor Pertanian dan Kredit Investasi berhubungan negatif dengan besaran Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2005-2014.	Variabel Independen: PDRB Sektor Pertanian (SDA) dan Kredit Investasi	Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen: PDRB Sektor Industri, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal.
9	(Rosmeli, 2015)	Penelitian ini menggunakan metode analisis Indeks Williamson dan Regresi Data Panel	PMA berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dan memiliki arah yang positif.	Variabel Dependen: Ketimpangan Pembangunan Variabel Independen: PMA	Variabel Independen: PMDN dan Tenaga Kerja

Sumber : Data Diolah (2021)

2.7 Kerangka Berfikir

2.7.1 Hubungan Sumber Daya Alam terhadap Ketimpangan Pembangunan

Aktivitas pembangunan ekonomi tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam sebagai modal utama dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Nangarumba (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan sumber daya alam berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan pemanfaatan dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu dalam proses pembangunan pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal namun juga tetap menjaga kelestarian lingkungan agar dapat terus digunakan secara terus menerus.

Zaini (2017) mengungkapkan kontribusi sumber daya alam berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Artinya semakin tinggi penggunaan sumber daya alam maka akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang tinggi pula disuatu daerah tersebut. Sehingga memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

2.7.2 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pembangunan

Rosmeli (2015) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh yang signifikan

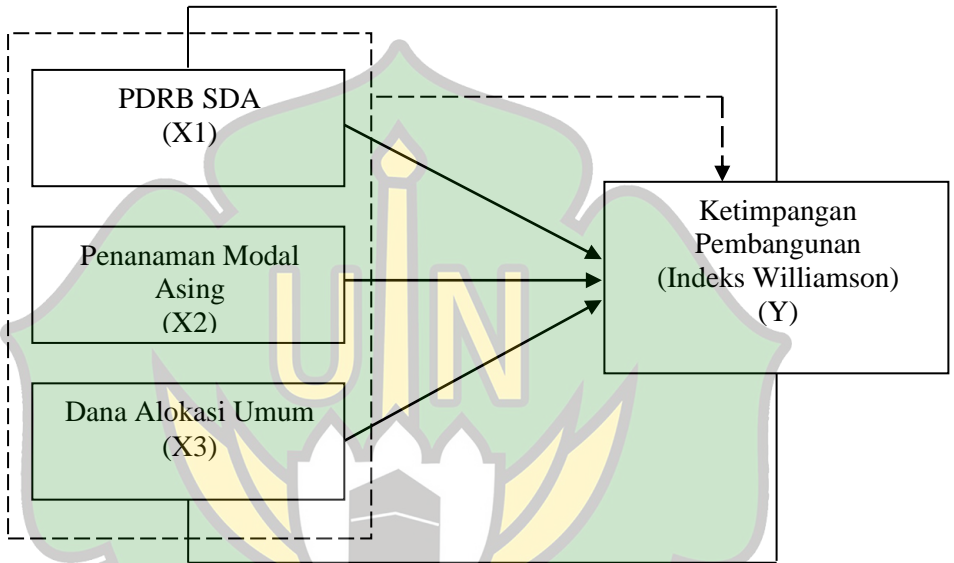
terhadap ketimpangan pembangunan dikawasan Indonesia Timur dan memiliki arah yang positif. Artinya penanaman modal asing dapat memicu ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia, hal ini disebabkan karena penanaman modal asing di kawasan Indonesia timur berfokus pada sektor industri, yang dimana keadaan tersebut kurang cocok pada kawasan Indonesia timur dikarenakan wilayah Indonesia timur yang memiliki banyak pulau sehingga penanaman modal asing hanya akan meningkatkan ketimpangan pembangunan di kawasan Indonesia timur. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Junaidi, & Erfit (2021) dimana investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

2.7.3 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, Zulgani, & Rosmeli (2017) menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Keadaan seperti ini memiliki arti bahwa provinsi Jambi memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dari segi pendanaan, yang dimana jika dana yang diberikan bertambah akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pembangunan pada wilayah yang ada di provinsi Jambi. Hal ini berolak belakang dengan temuan Safitri, Junaidi, & Erfit (2021) yang memperoleh bahwa Dana Perimbangan

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber: Data Diolah (2021)

2.9 Hipotesis Penelitian جامعة البرانس

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang timbul dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang penelitian, teori penelitian dan kerangka berpikir yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian ini memuat hipotesis sebagai berikut :

- H1: Terdapat pengaruh signifikan SDA secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera.
- H2: Terdapat pengaruh signifikan PMA secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera.

- H3: Terdapat pengaruh signifikan DAU secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera.
- H4: Terdapat pengaruh signifikan SDA, PMA dan DAU secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini tergolong dalam penelitian eksplanasi. Menurut Sugiyono (2017) penelitian eksplanasi adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui media perantara berupa lembaga atau instansi tertentu yang memiliki wewenang dalam memberikan informasi atau mempublikasikannya. Data skunder yang digunakan berbentuk data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Sumber Daya Alam (SDA) bersumber dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dari tahun 2011-2020, data yang digunakan merupakan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Data tersebut dapat diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2.2 Penanaman Modal Asing (PMA) bersumber dari Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri menurut Provinsi dari tahun 2011-2020. Data tersebut dapat diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari Realisasi Data Keuangan Daerah dari tahun 2011-2020. Data tersebut dapat diperoleh pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

3.3 Sampel

Sampel penelitian ini adalah data sumber daya alam, penanaman modal asing dan dana alokasi umum pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera yang dibatasi selama periode 2011-2020 (10 tahun).

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Klasifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel terikat (*dependen*) dan variabel (*independen*). Dalam penelitian ini variabel terikat (*dependen*) adalah ketimpangan ekonomi (Y). Sedangkan variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Alam (SDA), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan kalsifikasi variabel diatas, maka selanjutnya diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

a. Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan adalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah dengan wilayah lain secara horizontal maupun vertikal (Sjafrizal, 2012). Data yang digunakan adalah data ketimpangan pembangunan periode tahun 2011-2020 yang diukur menggunakan Indeks Williamson dan dinyatakan dalam satuan persentase.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah segala kandungan yang terdapat dalam biosfer sebagai energi potensial, baik bersembunyi di litosfer (tanah), hidrosfer (air), dan atmosfer (udara) yang dapat dijadikan manfaat untuk memenuhi keperluan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (Purba, et al., 2020). Data sumber daya alam pada penelitian ini adalah data PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian dalam periode tahun 2011-2020 dan dinyatakan dalam satuan Miliar Rupiah.

c. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Data pada penelitian ini adalah data realisasi investasi penanaman modal luar negeri periode tahun 2011-2020 dan dinyatakan dalam satuan Juta USD.

d. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rachim, 2015). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah dana alokasi umum pada periode 2011-2020 dan dinyatakan dalam satuan Miliar Rupiah.

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

3.5.1 Indeks Williamson

1) Metode Indeks Williamson

Metode Indeks Williamson dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang ada di Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 wilayah (provinsi) berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson (IW) berkisar antara 0 – 1, berdasarkan Indeks Williamson ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut (Sjafrizal, 2018):

- a. Apabila $IW < 0,3$ artinya tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah rendah.

- b. Apabila IW berada diantara 0,3 – 0,5 artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah sedang.
- c. Apabila $IW > 0,5$ artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah tinggi.

2) Teknik Analisis Data Indeks Williamson

Pengukuran tingkat ketimpangan pembangunan pada penelitian ini menggunakan Indeks Williamson, yaitu dengan formulasi sebagai berikut: (Sjafrizal, 2012)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i / n}}{\bar{Y}} \quad (3.1)$$

Keterangan :

- IW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita wilayah i (provinsi)
- \bar{Y} = PDRB perkapita seluruh wilayah
- f_i = Jumlah penduduk wilayah i (provinsi)
- n = Jumlah penduduk seluruh wilayah

3.5.2 Regresi Data Panel

1) Metode Analisis Data Panel

Metode analisi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel, yaitu penggabungan antara model regresi data *time series* dan data *cross section*.

2) Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yaitu penggabungan antara model regresi data *time series* dan *cross section*. Berikut adalah bentuk model estimasi data panel, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (*Dependen*)

$X_{1it, 2it, 3it}$ = Variabel Bebas (*Independen*) provinsi i tahun t

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ = Koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas (*independen*)

ε_i = *error term*

Model regresi data panel pada penelitian ini digunakan untuk menguji ketiga variabel bebas (*independen*) yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dana Alokasi Umum (DAU), maka model regresi data panel adalah sebagai berikut;

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 SDA_{it} + \beta_2 PMA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan :

KP_{it} = Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi
(Variabel *Dependen*)

SDA_{it} = Sumber Daya Alam di provinsi i tahun t

PMA_{it} = Penanaman Modal Asing di provinsi i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas (*independen*)

ε = *error term*

3.5.3 Model Estimasi Data Panel

Terdapat tiga macam pendekatan dalam menganalisis model regresi dengan menggunakan data panel, yaitu *Random Effect Model* (REM), *Pooled Least Square* (PLS)/*Common Effect Model* (CEM), dan *Fixed Effect Model* (FEM) (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011).

a. *Pooled Least Square* (PLS)/*Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah teknik pendekatan data panel yang paling sederhana, karena model ini menggabungkan data time series dan cross section menjadi data panel. Selanjutnya, pendekatan ini mengestimasi data panel dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). *Common Effect Model* (CEM) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 SDA_{it} + \beta_2 PMA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.5)$$

Keterangan :

KP_{it} = Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi
(Variabel Dependen)

SDA_{it} = Sumber Daya Alam di provinsi i tahun t

PMA_{it} = Penanaman Modal Asing di provinsi i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas
(*independen*)

ε = *error term*

b. *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang mengasumsikan bahwa besaran konstanta dipengaruhi oleh perbedaan obyek (*cross section*) dan juga perbedaan waktu (*time series*). Pendekatan ini juga menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam melakukan estimasi *Fixed Effect Model*. Persamaan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 SDA_{it} + \beta_2 PMA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.6)$$

Keterangan :

KP_{it} = Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi
(Variabel Dependen)

SDA_{it} = Sumber Daya Alam di provinsi i tahun t

PMA_{it} = Penanaman Modal Asing di provinsi i
tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel
bebas (*independen*)

ε = *error term*

c. *Random Effect Model*(REM)

Random Effect Model (REM) adalah model regresi yang mengestimasi data panel dengan memperhitungkan error/residual. Model ini berasumsi adanya perbedaan konstanta dan perbedaan koefisien regresi yang disebabkan oleh error/residual yang memiliki hubungan antar obyek dan waktu. Metode yang dipakai dalam model ini adalah *Generalized Least Square* (GLS). Persamaan matematis *Random Effect Model* (REM) dapat ditulis sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 SDA_{it} + \beta_2 PMA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.7)$$

Keterangan :

KP_{it} = Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi
(Variabel Dependen)

SDA_{it} = Sumber Daya Alam di provinsi i tahun t

PMA_{it} = Penanaman Modal Asing di provinsi i
tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel
bebas (*independen*)

ε = *error term*

3.5.4 Pemilihan Model Data Panel (Uji Spesifikasi Model)

Beberapa tahap pengujian dilakukan untuk menentukan model terbaik regresi data panel antara CEM, FEM dan REM. Pengujian tersebut terdiri dari tiga tahapan yaitu Uji Lagrange Multiplier (Uji LM), Uji Chow, dan Uji Hausman. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing uji spesifikasi model:

a. Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji LM dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Adapun hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika nilai probabilitas Bruesch-Pagan lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.

b. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membantu memilih model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Adapun hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai probabilitas *Redudant Fixed Effect* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha =$

0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang paling baik digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM). Namun untuk lebih meyakinkan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik, maka diperlukan yang namanya Uji Hausman.

c. Uji Hausman

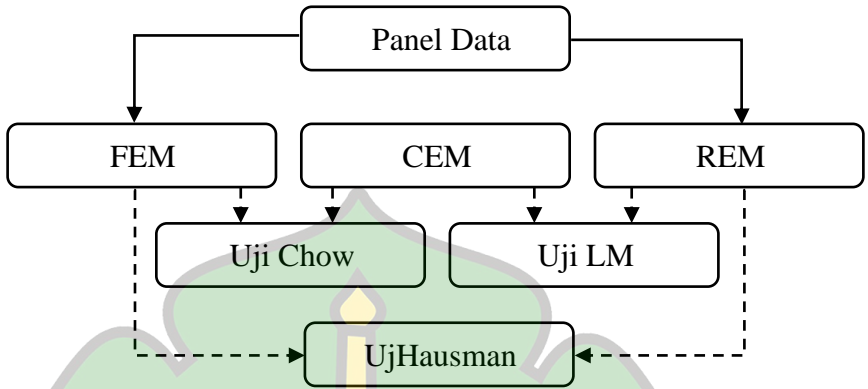
Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Adapun hipotesis dalam pengujian ini sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika nilai dari probabilitas *Correclated Random Effect* lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang paling baik digunakan adalah model *Fix Effect Model* (FEM). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang paling baik digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Gambar 3.1 Alur Uji Panel Data



Sumber: Data Diolah (2021)

3.6 Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*), terdapat tiga pengujian hipotesis yang umum dilakukan, yaitu Uji Hipotesis Parsial (Uji t), Uji Hipotesis Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2).

3.6.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji secara parsial atau uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas (*independen*) mempengaruhi variabel terikat (*dependen*) secara parsial (satu) dengan menganggap variabel lain tetap (*constant*). Uji t juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar signifikan variabel bebas (*independen*) mempengaruhi variabel terikat (*dependen*). Bila hasil

regresi menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (*independen*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (*independen*) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*).

3.6.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji secara simultan atau uji F dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) secara simultan (bersama-sama). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*independen*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sebaliknya jika nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari $\alpha = 0,05$, dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*independen*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*).

3.6.3 Koefisien Determinasi R^2 (R-squared)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas (*independen*) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (*dependen*). Jika nilai koefisien determinasi (R^2)

mendekati 1, maka variabel terikat (*dependen*) secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel bebas (*independen*). Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 0, maka variabel terikat (*dependen*) tidak dapat dijelaskan (hanya sedikit dapat dijelaskan) oleh variabel bebas (*dependen*).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sumatera merupakan pulau terbesar keenam didunia dan merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan dengan luas daratan mencapai 443.065 kilometer persegi. Pulau Sumatera juga memiliki sebutan lain yaitu “*Suwarnabhumi*” yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti Pulau Emas. Pulau Sumatera memiliki letak yang strategis dalam sisi ekonomi. Dimana Pulau Sumatera berbatasan dengan:

1. Batas Darat Pulau Sumatera:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan India
2. Batas Laut Pulau Sumatera:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Benggala
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Letak Pulau Sumatera yang strategis memiliki keuntungan baik ditinjau secara nasional, regional ASEAN, maupun global.

Dalam lingkup nasional Pulau Sumatera merupakan sentra sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbunh energi nasional. Secara regional ASEAN Pulau Sumatera merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia untuk negara-negara ASEAN. Sedangkan secara global Pulau Sumatera diharapkan dapat menjadi pintu gerbang ekonomi nasional untuk mencapai pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia (Sosilawati, 2016). Pulau Sumatera terdiri dari sepuluh provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

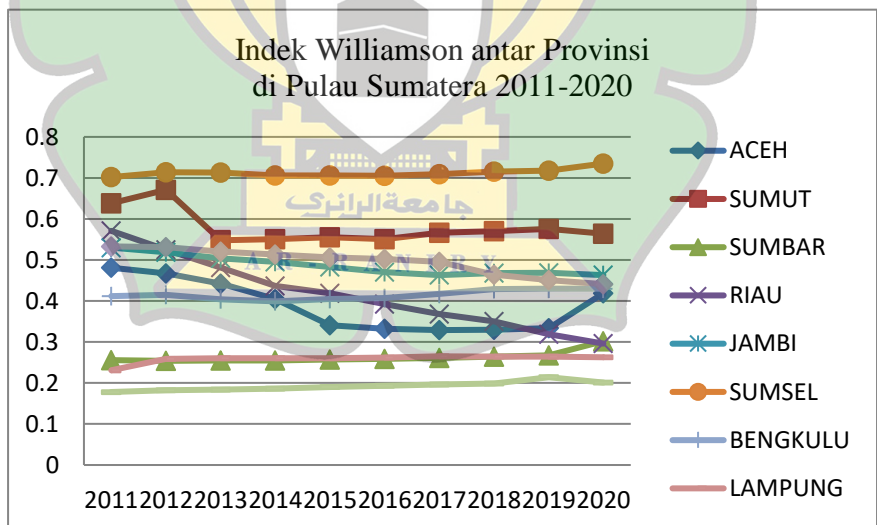
Gambar 4.1 Pulau Sumatera



Sumber: AMAZING INDONESIA (2011)

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian yang bernilai ekonomis tinggi dan juga memaksimalkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 lebih mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana (PP No.18, 2020).

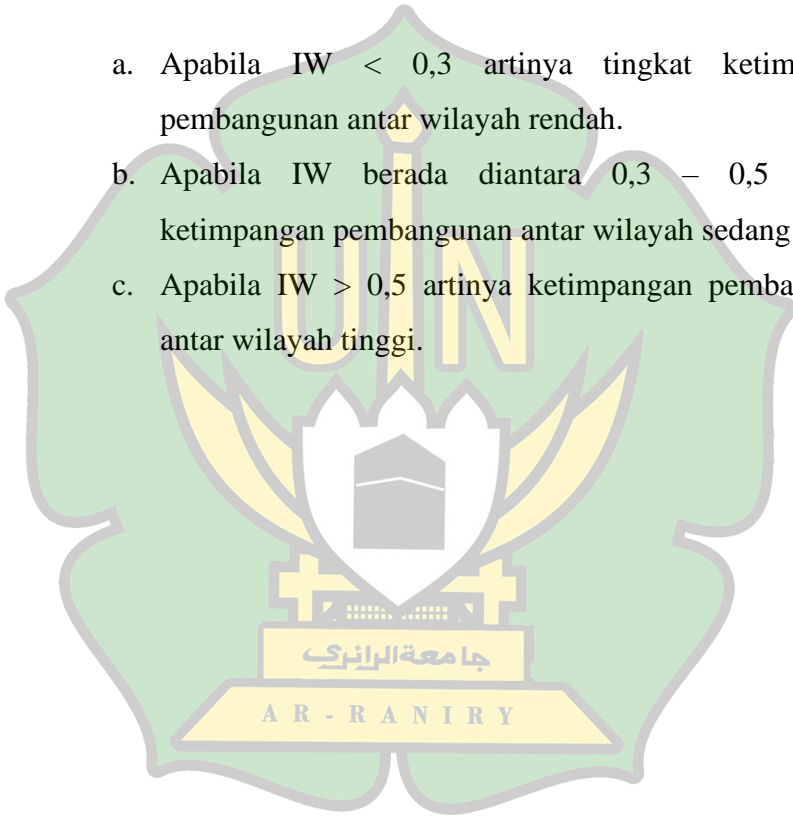
Gambar 4.2 Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020



Sumber : Data Diolah (2022)

Nilai ketimpangan pembangunan yang ada di Pulau Sumatera dihitung menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan data dari tahun 2011-2020. Perhitungan Indeks Williamson antar wilayah di Pulau Sumatera dapat dirumuskan sebagai berikut (Sjafrizal, 2018):

- a. Apabila $IW < 0,3$ artinya tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah rendah.
- b. Apabila IW berada diantara $0,3 - 0,5$ artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah sedang.
- c. Apabila $IW > 0,5$ artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah tinggi.



Tabel 4.1
Indeks Williamson Antar Provinsi di Pulau Sumatera,
2011-2020

Tahun	Provinsi									
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Selatan Sumatera	Bengkulu	Lampung	KepBabel	Kepri
2011	0,481	0,638	0,256	0,571	0,350	0,702	0,412	0,231	0,178	0,533
2012	0,467	0,671	0,254	0,525	0,519	0,714	0,415	0,259	0,182	0,531
2013	0,442	0,548	0,255	0,481	0,504	0,713	0,404	0,260	0,184	0,520
2014	0,405	0,551	0,255	0,437	0,495	0,706	0,399	0,260	0,186	0,513
2015	0,341	0,555	0,257	0,419	0,483	0,706	0,405	0,260	0,190	0,506
2016	0,332	0,551	0,259	0,392	0,470	0,705	0,407	0,262	0,193	0,502
2017	0,329	0,566	0,261	0,368	0,463	0,709	0,417	0,265	0,196	0,495
2018	0,330	0,570	0,264	0,350	0,468	0,715	0,429	0,264	0,199	0,464
2019	0,334	0,576	0,267	0,319	0,469	0,718	0,430	0,264	0,214	0,451
2020	0,419	0,564	0,302	0,296	0,463	0,735	0,430	0,263	0,201	0,441
Rata-rata	0,388	0,579	0,263	0,416	0,489	0,712	0,415	0,259	0,192	0,496
Ket	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang

Sumber : Data Diolah (2022)

Nilai Indeks Williamson antar provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2011-2020. Pada tabel 4.1 dan Gambar 4.2, menunjukkan bahwa provinsi dengan rata-rata tingkat ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera adalah provinsi Sumatera Selatan yaitu

sebesar 0,712% dan Kemudian disusul oleh Sumatera Utara yaitu sebesar 0,579%. Provinsi yang memiliki rata-rata tingkat ketimpangan sedang adalah provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 0,496%, kemudian ada provinsi Jambi dengan rata-rata tingkat ketimpangan pembangunan sebesar 0,489%, selanjutnya ada provinsi Riau dengan rata-rata 0,416% dan ada provinsi Bengkulu dengan rata-rata tingkat ketimpangan pembangunan sebesar 0,415%. Terakhir ada provinsi Aceh dengan rata-rata tingkat ketimpangan sebesar 0,388%. Provinsi yang memiliki rata-rata tingkat ketimpangan rendah adalah provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata sebesar 0,263%, kemudian ada provinsi Lampung dengan tingkat rata-rata ketimpangan pembangunan sebesar 0,259% dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan rata-rata tingkat ketimpangan sebesar 0,192%.

Tabel 4.2
Kategori Ketimpangan Pembanguna antar
Provinsi di Pulau Sumatera, 2011-2020

Provinsi	Kategori Ketimpangan
Sumatera Selatan, Sumatera Utara	Tinggi
Kep. Riau, Jambi, Riau, Bengkulu, dan Aceh	Sedang
Sumatera Barat, Lampung, dan Kep. Banga Belitung	Rendah

Sumber: Data Diolah (2022)

4.2 Temuan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh sumber daya alam, penanaman modal asing, dan dana alokasi umum terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera. Penentuan model terbaik yang akan digunakan dengan melakukan Uji Lagrange Multiplier (LM), Uji Chow dan Uji Hausman. Berikut adalah hasil dari uji tersebut.

4.2.1 Uji Chow

Uji Chow : H_0 = *Common Effect Model*

H_1 = *Fixed Effect Model*

Tabel 4.3

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	276.649890	(9,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	338.841450	9	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan E-views 12.0 (2022)

Tabel 4.2 menunjukkan hasil dari Chow dimana angka probabilitas dari *Cross-section F* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Common Effect Model*

(CEM) lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman : $H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Tabel 4.4

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.633067	3	0.0013

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan E-views 12.0 (2022)

Tabel 4.4 menunjukkan hasil dari Uji Hausman dengan memperoleh angka *Chi-square* 0,0013 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan dari hasil estimasi model data panel diatas, maka model yang terbaik dan tepat digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.3 Model Regresi Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNSDA_{it} + \beta_2 LNPMA_{it} + \beta_3 LNDAU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.1)$$

$$KP_{it} = -8,590 + 0,896LNSDA_{it} + 0,010LNPMA_{it} - 0,303LNDAU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

Keterangan :

KP_{it} = Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Variabel Dependen)

SDA_{it} = Sumber Daya Alam di provinsi i tahun t

PMA_{it} = Penanaman Modal Asing di provinsi i tahun t

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum provinsi i tahun t

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien pada masing-masing variabel bebas (independen)

ε = *error term*

Tabel 4.5
Hasil Estimasi Data Panel Metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.590299	1.061894	-8.089599	0.0000
LN_SDA	0.896325	0.112154	7.991939	0.0000
LN_PMA	0.010293	0.010499	0.980418	0.3296
LN_DAU	-0.303048	0.029999	-10.10208	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan E-views 12.0 (2022)

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM) yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, apabila selama periode 2011-2020 sumber daya alam, penanaman modal asing dan dana alokasi umum diasumsikan tetap, maka ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera selama periode penelitian tersebut akan menurun sebesar 8,590%,

Kedua, nilai koefisien dari variabel Sumber Daya Alam sebesar 0,896 yang berarti bahwa setiap kenaikan sumber daya alam sebesar 1 miliar rupiah, maka akan meningkatkan angka ketimpangan pembangunan ekonomi pada Pulau Sumatera sebesar 0,896%. Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera Periode 2011-2020.

Ketiga, nilai koefisien Penanaman Modal Asing sebesar 0,010 yang menandakan bahwa setiap terjadinya peningkatan penanaman modal asing sebesar 1 juta US\$, maka juga akan berdampak pada peningkatan tingkat ketimpangan pembangunan

ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 0,010%. Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera Periode 2011-2020.

Keempat, nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar - 0,303 yang berarti setiap ada kenaikan dana alokasi umum sebesar 1 miliar rupiah, maka akan menurunkan nilai ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 0,303%. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera Periode 2011-2020.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji secara parsial atau uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas (*independen*) mempengaruhi variabel terikat (*dependen*) secara parsial (satu) dengan menganggap variabel lain tetap (*constant*). Bila hasil regresi menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (*independen*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (*independen*) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a) H_0 : Tidak terdapat pengaruh Sumber Daya Alam secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.
- H_1 : Terdapat pengaruh Sumber Daya Alam secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.
- b) H_0 : Tidak terdapat pengaruh Penanaman Modal Asing secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.
- H_1 : Terdapat pengaruh Penanaman Modal Asing secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.
- c) H_0 : Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.
- H_1 : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.

Adapun hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.590299	1.061894	-8.089599	0.0000
LN_SDA	0.896325	0.112154	7.991939	0.0000
LN_PMA	0.010293	0.010499	0.980418	0.3296
LN_DAU	-0.303048	0.029999	-10.10208	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan E-views 12.0 (2022)

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Variabel Sumber Daya Alam memiliki nilai koefisien sebesar 0,896 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,0000 < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga variabel Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera periode 2011-2020. Nilai koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.
- b) Variabel Penanaman Modal Asing memiliki nilai koefisien sebesar 0,010 dan nilai probabilitas sebesar 0,3296 atau lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,3296 > 0,05$) yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh tidak signifikan secara

parsial terhadap Variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera periode 2011-2020.

- c) Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien sebesar -0,303 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,0000 > 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera periode 2011-2020. Nilai koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

4.4.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji secara simultan atau uji F dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) secara simultan (bersama-sama). Uji F juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*independen*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sebaliknya jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari $\alpha = 0,05$, dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*independen*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*). Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Sumber Daya Alam, Penanaman Modal Asing, dan Dana Alokasi Umum secara

simultan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.

H_1 : Terdapat pengaruh Sumber Daya Alam, Penanaman Modal Asing, dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.

Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

R-squared	0.975863	Mean dependent var	-0.938937
Adjusted R-squared	0.972533	S.D. dependent var	0.393834
S.E. of regression	0.065271	Akaike info criterion	-2.499813
Sum squared resid	0.370642	Schwarz criterion	-2.161141
Log likelihood	137.9907	Hannan-Quinn criter.	-2.362746
F-statistic	293.1128	Durbin-Watson stat	0.995505
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan E-views 12.0 (2022)

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$ ($0,0000 < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga Variabel Sumber Daya Alam, Penanaman Modal Asing, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Variabel Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera periode 2011-2020.

4.4.3 Koefisien Determinasi R^2 (*R-squared*)

Koefisien determinasi atau Uji R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas (*independen*) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (*dependen*).

Tabel 4.8
Hasil Koefisien Determinasi R^2 (*R-Squared*)

R-squared	0.975863	Mean dependent var	-0.938937
Adjusted R-squared	0.972533	S.D. dependent var	0.393834
S.E. of regression	0.065271	Akaike info criterion	-2.499813
Sum squared resid	0.370642	Schwarz criterion	-2.161141
Log likelihood	137.9907	Hannan-Quinn criter.	-2.362746
F-statistic	293.1128	Durbin-Watson stat	0.995505
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan E-views 12.0 (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien determinasi *R-squared* sebesar 0,975863 atau 97,59%. Hal ini berarti variabel SDA, PMA, dan DAU dapat menjelaskan variabel Ketimpangan Pembangunan sebesar 97,59% sisanya sebesar 2,41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model pada penelitian ini.

4.5 Analisis Ekonomi

4.5.1 Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Sumber daya alam merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Keberadaan sumber daya alam seharusnya dapat menunjang perekonomian yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat di suatu daerah. Keberadaan sumber daya alam tentunya akan membantu suatu daerah menarik investor untuk menanamkan modalnya dan juga akan merangsang pertumbuhan lapangan kerja.

Nyatanya keberadaan sumber daya alam belum cukup menjamin perekonomian suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin. Sumber daya alam perlu pengelolaan yang efektif dan efisien agar sumber daya alam dapat berdampak positif pada suatu daerah. Terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*renewable resources*) yang harus digunakan seminimal mungkin, namun dapat memberikan dampak semaksimal mungkin terhadap perekonomian.

Penelitian ini menggunakan sumber daya alam sebagai salah satu faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam yang pada penelitian ini terdiri dari sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian suatu daerah akan meningkatkan ketimpangan pembangunan pada daerah tersebut.

Pengaruh positif sumber daya alam yang mengakibatkan peningkatan ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera dapat terjadi karena pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sumatera belum sepenuhnya dikelola dengan maksimal, terkadang pemerintah mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Salah satu yang sering kali diabaikan oleh pemerintah adalah dampak eksternalitas negatif berupa polusi tanah, udara, dan air (TUA) yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi. Semakin buruknya kualitas TUA akan menimbulkan biaya penanggulangan yang semakin tinggi dan akan memberatkan tercapainya tujuan pembangunan nasional (Suparmoko, 2015). Tidak hanya itu kegiatan pengelolaan sumber daya alam merupakan sebuah proses yang memerlukan dukungan berupa modal, tenaga kerja, skill dan teknologi, namun keterbatasannya sumber daya manusia di bidang teknologi membuat pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki belum maksimal (Siregar, 2014).

Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Zaini (2017) mengungkapkan kontribusi sumber daya alam berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Artinya semakin tinggi penggunaan sumber daya alam maka akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang

tinggi pula disuatauderahtersebut. Sehingga memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

4.5.2 Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Pembangunan merupakan proses yang memerlukan modal agar dapat merangsang pembangunan suatu daerah terlebih lagi negara berkembang yang sangat terbatas dengan modalnya. Modal sendiri dapat diperoleh melalui investasi dimana berdasarkan sumbernya investasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMA merupakan salah satu sumber dana yang aliran modalnya relatif stabil dan memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Kenyataannya penanaman modal asing di Pulau Sumatera belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Hal tersebut dapat tercermin dari aliran investasi asing yang sangat minim dan hanya beberapa provinsi yang memperoleh aliran investasi yang cukup besar. Keadaan yang demikian tidak terlepas dari peran pemerintah daerah agar dapat menarik minat investor agar untuk berinvestasi di daerahnya, baik dari kebijakan regulasi dan hal-hal lain.

Hasil penelitian ini yang menggunakan variabel penanaman modal asing menunjukkan hubungan yang positif namun tidak

signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Kenaikan penanaman modal asing malah akan memicu peningkatan ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera. Hasil yang demikian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh temuan Ilham & Pangaribowo (2017) dimana PMA memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rosmeli (2015) dimana peningkatan PMA memicu tingkat ketimpangan pembangunan di wilayah Indoensia Timur. Serta penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Sasongko (2021) yang berpendapat bahwa penanaman modal asing akan memicu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat ketimpangan pada suatu daerah. Pernyataan tersebut juga sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Sugiyanto (2013) yang juga memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera

Dana alokasi umum merupakan salah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum merupakan dana yang porsinya terbesar dibandingkan dengan dana transfer pemerintah lainnya. Dana alokasi umum

sendiri dapat menjadi pendapatan terbesar yang dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan di suatu daerah.

Dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di fokuskan pada pembangunan infrastruktur, dimana salah satu program pemerintah dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur daerah yaitu dengan mengalokasikan dana alokasi umum sebesar 25% dengan tujuan agar dana alokasi umum juga tertuju pada pembangunan pelayanan publik dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan merupakan kabupaten dengan alokasi terbesar (Kementerian Keuangan, 2020). Pernyataan ini serupa dengan Penelitian yang dilakukan oleh Kiton (2019) dimana dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dialokasikan untuk membiayai program pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera, hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat memiliki dampak untuk mengurangi ketimpangan. Hasil penelitian serupa diperoleh Safitri, Junaidi, & Erfit (2021) dimana dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson, serta menggunakan model regresi data panel berupa *Fixed Effect Model* (FEM) maka, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya alam (SDA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 0,896. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sumber daya alam meningkat sebesar 1 miliar maka juga akan memicu peningkatan tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera sebesar 0,896%.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena aliran modal asing yang masuk terlalu sedikit sehingga tidak berdampak pada tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera.
3. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera yaitu sebesar -0,303. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 miliar akan mengurangi tingkat

ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 0,303%.

4. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan sumber daya alam, penanaman modal asing, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2011-2020.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
 - a. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam menghitung tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi agar penelitian yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan memiliki hasil yang lebih beragam dan memperoleh gambaran dari sudut pandang yang berbeda.
 - b. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan tahun penelitian terbaru dengan periode yang lebih panjang, agar dapat memberikan gambaran ketimpangan pembangunan ekonomi yang lebih luas lagi. Serta diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel diluar dari penelitian ini seperti Dana Alokasi Khusus yang lebih spesifik digunakan dalam proses pembangunan.

2. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam proses pembangunan disuatu daerah salah satunya adalah dalam mengatasi ketimpangan di daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing.
- b. Pemerintah daerah sebaiknya dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dengan meningkatkan sumber daya manusia dan penerapan teknologi terbaru serta memperhatikan dampak eksternalitas yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam.
- c. Pemerintah harus melakukan perubahan birokrasi investasi agar tidak terlalu berbelit-belit dan banyak memakan waktu.
- d. Dana alokasi umum harus tersalurkan dengan baik sesuai porsinya yang telah diberikan, jangan bertumpuk pada satu sektor tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- AMAZING INDONESIA. (2011).
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol 7 No. 1, 26-34.
- Ardiansyah. (2015). *Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal*. Kajian Magister Hukum.
- Badan Pusat Statistik. (2021). BPS.
- CNN Indonesia. (2020). *Jurang Ketimpangan Si Kaya dan Miskin di RI Makin Melebar*. Jakarta: CNN Indonesia.
- DetikNews. (2021). *Menonton Ketimpangan*. Jakarta: detiknews.com.
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, Vol 5 No. 1, 101-108.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021).
- Fauzi, A. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, M. (2013). Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia :Fakta dan Strategi Inisiatif. *Orasi Ilmiah Guru Besar*, (hal. 1-34). Bogor.
- GATRA Media Group. (2021). *INDEF: Pertumbuhan Ekonomi Nasional 7,07% Bersifat Semu*. Jakarta: GATRACOM.

- Hapsari, P. P., Hakim, A., & Soeaidy, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintahan Kota Batu). *Jurnal Wacana* , Vol 17 No. 2, 88-96.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Hidayat, M., & Rahayu, S. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antar Kabutapen/Kota di Provinsi Riau : Pendekatan Regresi Kuadratik. *Jurnal Ekonomi Sakti* , Vol 7 No.1, 11-9.
- Hodijah, S. (2015). Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah. *Jurnal Paradigma Ekonomika* , Vol 10 No. 2, 350-362.
- Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Bumi Indonesia* , Vol 6 No.4, 1-10.
- Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi* , Vol 12 No.1, 137-145.
- Kelas Pintar. (2019). *Potensi dan Persebaran Sumber Daya Alam di Indoensia*. Kelas Pintar in EDUTECH.
- Kiton, M. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart* , Vol 3 No.2, 68-80.
- Kontan. (2021). *BPS catat, dalam setahun terakhir tingkat ketimpangan penduduk kian melebar*. Jakarta: Kontan.co.id.
- Kurniawan, B. R., & Sugiyanto, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat

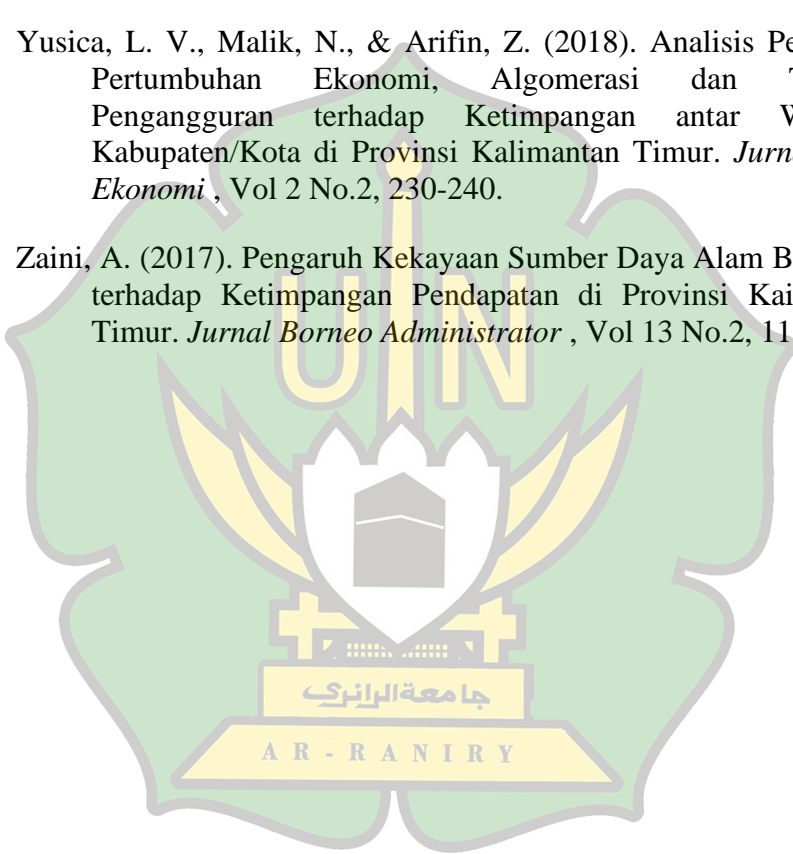
Jumlah Orang yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal of Economics* , Vol 2 No.1, 1-14.

- Maddinsyah, A., Kustini, E., & Syakhrial. (2018). Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger Lebak-Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* , Vol 1 No.1, 71-80.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indoensia Tahun 2005-2014. *JESP* , Vol 7 No.2, 9-26.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Oktaviani, W., Zulgani, & Rosmeli. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* , Vol 6 No.3, 105-112.
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: Rajawali Pers.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M., Bachtiar, E., et al. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam : Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purnamasari, S. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Banten: UNPAM PRESS.

- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- REPUBLIKA. (2021). *Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Makin Melebar*. Jakarta: REPUBLIKA.CO.ID.
- Rosmeli. (2015). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika* , Vol 10 No.2, 362-369.
- Safitri, E., Junaidi, & Erfit. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). *Jurnal Paradigma Ekonomika* , Vol 16 No.1, 141-150.
- Sanjaya, L. R., Soertato, E., & Pravitasari, A. E. (2019). Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kajian Pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemekarannya). *Jurnal TATALOKA* , Vol 21 No.2, 254-266.
- Sari, D. W., Setianto, R. H., Primanti, M. R., & Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Mengenal Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, I. R. (2014). *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia yang Belum Maksimal*. Bisnis.com.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sofi, I. (2020). *Pemenuhan Anggaran Infrastruktur Di Daerah dan Tantangannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sosilawati. (2016). *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Subandi. (2014). *SISTEM EKONOMI INDONESIA*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno, S. (2010). *MAKROEKONOMI : TEORI PENGANTAR, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suleman, A. R., Ahdiyati, M., Nainggolan, L. E., Rahmadana, M. F., Syafii, A., Supitriyani, E. S., et al. (2020). *Ekonomi Makro*. Yayasan Kita Menulis.
- Suparmoko, M. (2015). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Syaripuddin, Semmaila, B., & Aminuddin. (2021). Pengaruh Alomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indek Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sulawesi. *Jurnal Ilmu Ekonomi* , Vol 4 No.1, 37-55.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi, Edisi 11, Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Untoro, J. (2010). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kawah Media.

- Wibowo, H., & Sasongko, L. A. (2021). Ketimpangan Pembangunan Regional dan Investasi di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta* , 118-123.
- World Bank. (2016). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Algoterasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi* , Vol 2 No.2, 230-240.
- Zaini, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batubara terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator* , Vol 13 No.2, 111-130.



LAMPIRAN

Lampiran 1 *Common Effect Model* (CEM)

Dependent Variable: LN_IW
Method: Panel Least Squares
Date: 01/06/22 Time: 14:14
Sample: 2011 2020
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.997193	0.645929	-3.091968	0.0026
LN_SDA	0.118245	0.049593	2.384294	0.0191
LN_PMA	0.101014	0.031043	3.253967	0.0016
LN_DAU	-0.108411	0.081928	-1.323245	0.1889
R-squared	0.285073	Mean dependent var		-0.938937
Adjusted R-squared	0.262732	S.D. dependent var		0.393834
S.E. of regression	0.338163	Akaike info criterion		0.708601
Sum squared resid	10.97801	Schwarz criterion		0.812808
Log likelihood	-31.43007	Hannan-Quinn criter.		0.750776
F-statistic	12.75982	Durbin-Watson stat		0.094008
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Lampiran 2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: LN_IW
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/22 Time: 14:16
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.590299	1.061894	-8.089599	0.0000
LN_SDA	0.896325	0.112154	7.991939	0.0000
LN_PMA	0.010293	0.010499	0.980418	0.3296
LN_DAU	-0.303048	0.029999	-10.10208	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975863	Mean dependent var	-0.938937
Adjusted R-squared	0.972533	S.D. dependent var	0.393834
S.E. of regression	0.065271	Akaike info criterion	-2.499813
Sum squared resid	0.370642	Schwarz criterion	-2.161141
Log likelihood	137.9907	Hannan-Quinn criter.	-2.362746
F-statistic	293.1128	Durbin-Watson stat	0.995505
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 3 *Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: LN_IW
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/06/22 Time: 14:17
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.182778	0.857271	-7.212161	0.0000
LN_SDA	0.640468	0.089316	7.170797	0.0000
LN_PMA	0.010661	0.010466	1.018669	0.3109
LN_DAU	-0.250903	0.026564	-9.445081	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.391055	0.9729
Idiosyncratic random			0.065271	0.0271
Weighted Statistics				
R-squared	0.455077	Mean dependent var		-0.049489
Adjusted R-squared	0.438048	S.D. dependent var		0.092622
S.E. of regression	0.069433	Sum squared resid		0.462804
F-statistic	26.72389	Durbin-Watson stat		0.695507
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.664808	Mean dependent var		-0.938937
Sum squared resid	25.56385	Durbin-Watson stat		0.012591

Lampiran 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	276.649890	(9,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	338.841450	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LN_IW

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/22 Time: 14:18

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.997193	0.645929	-3.091968	0.0026
LN_SDA	0.118245	0.049593	2.384294	0.0191
LN_PMA	0.101014	0.031043	3.253967	0.0016
LN_DAU	-0.108411	0.081928	-1.323245	0.1889
R-squared	0.285073	Mean dependent var		-0.938937
Adjusted R-squared	0.262732	S.D. dependent var		0.393834
S.E. of regression	0.338163	Akaike info criterion		0.708601
Sum squared resid	10.97801	Schwarz criterion		0.812808
Log likelihood	-31.43007	Hannan-Quinn criter.		0.750776
F-statistic	12.75982	Durbin-Watson stat		0.094008
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.633067	3	0.0013

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LN_SDA	0.896325	0.640468	0.004601	0.0002
LN_PMA	0.010293	0.010661	0.000001	0.6562
LN_DAU	-0.303048	-0.250903	0.000194	0.0002

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LN_IW

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/22 Time: 14:20

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.590299	1.061894	-8.089599	0.0000
LN_SDA	0.896325	0.112154	7.991939	0.0000
LN_PMA	0.010293	0.010499	0.980418	0.3296
LN_DAU	-0.303048	0.029999	-10.10208	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975863	Mean dependent var	-0.938937
Adjusted R-squared	0.972533	S.D. dependent var	0.393834
S.E. of regression	0.065271	Akaike info criterion	-2.499813
Sum squared resid	0.370642	Schwarz criterion	-2.161141
Log likelihood	137.9907	Hannan-Quinn criter.	-2.362746
F-statistic	293.1128	Durbin-Watson stat	0.995505
Prob(F-statistic)	0.000000		